

BAB IV

PENUTUP

Proses penutupan Lokalisasi Sunan Kuning yang berada di Argorejo sudah cukup lama berjalan. Poin tersebut menjelaskan jika program tersebut memang salah satu hal penting dan Pemerintah Daerah Kota Semarang sangat serius untuk merealisasikannya. Tidak hanya sekedar program yang dicanangkan dan apabila selesai lalu ditinggalkan, pemerintah meyakini jika hasil dari penutupan berdampak signifikan bagi masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui segala hal-hal penting yang sejak awal ingin diteliti sesuai dengan judul yang dibuat.

Penelitian ini telah dijalankan oleh peneliti sesuai dengan metode dan tata cara sesuai dengan petunjuk yang diarahkan serta berupaya untuk mengakumulasi segala informasi yang didapat menjadi satu penelitian yang tepat dan akurat. Segala data yang dicari dan didapat oleh peneliti dianggap sesuai dan pantas menjadi bahan utama penelitian. Semua yang tercantum dalam penelitian diharap bisa menjadi literatur penelitian lain yang berkaitan.

Penelitian ini berakhir dengan bagian penutup berupa kesimpulan dan saran oleh peneliti terhadap penutupan Lokalisasi Sunan Kuning di Argorejo yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Peneliti berupaya memberikan jawaban terbaik demi keberhasilan program-program lain yang dibuat oleh Pemerintahan Kota Semarang. Hal ini dikarenakan perlu adanya perencanaan yang matang dengan memperhitungkan segala aspek yang berhubungan dan

dipercaya berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai dengan penelitian ini.

4.1. Simpulan

Peneutupan Lokalisasi Sunan Kuning yang berada di Argorejo Kota Semarang adalah salah satu kebijakan pemerintah daerah yang memakan waktu cukup lama. Program ini dijalankan oleh pemerintah daerah dengan mencoba menghindari gejala penolakan oleh warga sekitar terutama para pekerja di sana seperti pemilik tempat hiburan, pedagang, serta WPS yang aktif menjalankan mata pencaharian mereka. Penelitian pun memberikan hasil dari rumusan masalah yang dicari oleh peneliti.

1. Proses penutupan Lokalisasi Sunan Kuning Kota Semarang 2019 berjalan dengan masa lalu yang rumit. Sangat banyak hambatan yang terjadi dalam program penutupan Lokalisasi Sunan Kuning khususnya setelah terbentuknya SK Walikotamadya No 462.3/529/1984 yang gagal terlaksanakan. Pergantian antara pemimpin sebelumnya dengan pemimpin baru membuat keberadaan Lokalisasi Sunan Kuning menjadi tidak stabil. Pembaharuan SK Wali Kota yang dilakukan untuk memindahkan Lokalisasi ke tempat lain justru tidak berhasil dan berakhir menjadi kebijakan yang gagal dicapai. Pemerintah memerlukan waktu yang panjang untuk mengatasi permasalahan penolakan dari beberapa pihak WPS dan warga Argorejo yang menolak untuk ditutup. Pada hari penutupan acara berjalan dan tertata cukup dihadiri beberapa bagian pemerintahan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP. Kedatangan Wali Kota

Semarang, Hendrar Prihadi disambut dengan baik oleh warga sekitar. Penjelasan oleh Wali Kota juga diterima dengan lapang dada oleh WPS. Pemberian dana tali asih pun juga berjalan dengan baik diawasi oleh Satpol PP sehingga proses tetap tertib dan lancar. Walaupun begitu, masih ada beberapa WPS yang mengaku kurang adilnya pemberian dana tali asih dan tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan yaitu Rp10 juta. Kekecewaan tersebut diutarakan kepada media lokal dan nasional. Walaupun begitu, hal tersebut tidak mengubah jumlah dana yang diberikan yaitu Rp5 juta. Pihak terkait seperti dinas sosial, kesbangpol, dan administrasi Pemerintah Daerah Kota Semarang telah mengetahui segala permasalahan sebelum dan saat penutupan berlangsung, sehingga mereka dapat meminimalisir segala ancaman-ancaman. Pemulangan para WPS yang berasal dari luar Kota Semarang berlangsung dengan baik dan tertib. Adapula WPS yang kembali ke kampung halamannya tanpa dipulangkan bersama menggunakan angkutan bus yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan mereka mengaku takut identitas mereka sebagai WPS diketahui oleh warga di daerah asal mereka. Maka dari itu, mereka memilih pulang secara mandiri. Penutupan pun berjalan sesuai dengan perjanjian yang dianggap tidak terlalu memberatkan pekerja di sana yaitu hanya menutup tempat yang dianggap menyediakan prostitusi. Pemerintah tidak menutup tempat hiburan lain seperti hiburan karaoke di sana. Para pekerja di tempat karaoke tetap dapat melanjutkan mata pencaharian mereka sesuai protokol menghindari prostitusi karena tempat tersebut bukan lagi lokalisasi.

2. Faktor utama kebijakan penutupan Lokalisasi Sunan Kuning terbagi menjadi dua yaitu Internal dan eksternal. Faktor internal sendiri lebih mengacu kepada warga sekitar daerah yang terdampak oleh lokalisasi. Ada beberapa laporan jika warga sekitar menerima dengan baik program yang dicanangkan pemerintah ini. Hal itu menjadi salah satu motivasi pemerintah untuk menutup Lokalisasi Sunan Kuning tanpa khawatir adanya perlawanan dari warga, karena warga sendiri menyetujui adanya program tersebut. Di sisi lain, faktor internal ini masih cukup lemah dengan alasan warga yang mengharapkan adanya penutupan berlangsung. Faktanya, cukup banyak yang merasa kecewa dan takut masa depan ekonomi mereka akibat penutupan. Dapat dikatakan, warga cenderung pasrah terhadap program pemerintah tanpa adanya rasa ingin melakukan perlawanan yang berarti karena pada dasarnya pekerjaan mereka bukanlah pekerjaan yang mulia dan patut diapresiasi. Karena itu, motivasi untuk melawan tidak terlalu berdampak signifikan, namun tetap berpengaruh terhadap masukan oleh pemerintah. Faktor eksternal sendiri lebih berfokus kepada kebijakan pemerintah daerah yang memang sudah merencanakan ini jauh-jauh hari dan hanya perlu merealisasikannya saja. Dukungan dari pemerintah pusat pun juga menjadi salah satu dorongan pemerintah daerah agar segera menjalankan tugas mereka untuk membuat Indonesia bebas dari prostitusi. Segala pihak yang berhubungan dengan program ini bertanggung jawab penuh untuk menjalankan kebijakan tersebut dan diketahui penuh oleh Wali Kota Semarang sebagai pihak utama perealisasi kebijakan di Kota Semarang. Dukungan pemerintah pusat sendiri salah satunya berupa apresiasi

kepada Kota Semarang dan prestasi yang diberikan karena mampu mengatasi penyakit masyarakat di kotanya. Hal ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk memiliki motivasi membentuk keadaan masyarakat yang bebas dari prostitusi dan penyakit masyarakat lainnya. Faktor internal dan eksternal saling berhubungan satu sama lain. Namun dalam hal ini eksternal menjadi faktor paling berpengaruh karena program ini menjadi salah satu program yang cukup tua dan memakan waktu bertahun-tahun dalam perencanaannya, serta pendekatan yang sangat signifikan kepada warga sekitar agar adanya keakraban diantara pemerintah dan masyarakat sekitar. Faktor internal memberikan kepercayaan kepada pemerintah namun juga menjamin segala kebutuhan warga yang ditakutkan membuat masyarakat sekitar kehilangan poin penting dalam kehidupan mereka yaitu keberlangsungan perekonomian mereka. Maka dari itu, penutupan membiarkan tempat seperti karaoke dan hiburan lainnya tetap berjalan dengan diawasi oleh ormas sekitar salah satunya PAKAR.

3. Kebijakan penutupan lokalisasi jelas memiliki dampak yang muncul dengan mempengaruhi keadaan di masyarakat. Dampak kehidupan sosial masyarakat berubah terutama cara hidup mereka. Keadaan ini berpengaruh kepada minoritas dan mayoritas di Semarang. Para WPS sebagai salah satu kaum yang memiliki mata pencaharian minoritas menjadi target utama dalam program pemerintah daerah ini. Adanya anggapan kurang terpujinya pekerjaan yang mereka lakukan menjadi kurangnya simpatikan terhadap keadaan mereka akibat penutupan lokalisasi tersebut. Walaupun begitu, pemerintah masih

memberikan santunan berupa ganti rugi yang dianggap cukup setiap orangnya. Pelatihan yang diberikan sebelum dan sesudah penutupan menjadi modal utama perubahan tata cara hidup dalam menjalani perekonomian baru mereka. Mayoritas warga kota Semarang sendiri juga terpengaruh dalam kebijakan ini. Hal ini memberikan penjelasan jika perlu adanya keadaan di kehidupan masyarakat yang bersih dari penyakit masyarakat. Masyarakat tentu dipaksa menghindari segala bentuk penyakit-penyakit tersebut sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang bersih. Warga Semarang pun juga dicegah untuk mendapatkan akses-akses mudah mendapatkan jasa prostitusi. Penutupan lokalisasi dapat juga mempengaruhi kehidupan berkeluarga yang baik bagi masyarakat dan dapat menjaudi pertengkaran rumah tangga bagi sebagian keluarga. Selama ini pula, warga sekitar Argorejo sendiri lebih terkenal dengan daerah lokalisasi yang memberikan pandangan negatif oleh warga lain. Pandangan ini berlangsung bertahun-tahun bahkan untuk beberapa orang daerah Argorejo sendiri lebih dikenal dengan daerah Sunan Kuning daripada nama aslinya. Pembersihan nama daerah Argorejo dengan berakhirnya operasi prostitusi di Lokalisasi Sunan kuning terealisasi dan dapat merubah citra warga sekitar di sana menjadi lebih positif. Terdapat warga asli sana yang juga meyakini kebijakan ini memperbaiki citra mereka yang tinggal di sana. Namun dalam segala efek yang paling berpengaruh didapatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang sendiri. Pasalnya, program penutupan ini meningkatkan tingkat elektabilitas dan kepercayaan warga terhadap pemerintahan yang sedang berjalan karena mampu merealisasikan program

yang sudah lama dan bertahun-tahun direncanakan. Status prestasi tersebut terus ada dan dapat meyakini masyarakat Kota Semarang kepada pemerintah bahwa mereka serius untuk membentuk kota mereka menjadi jauh lebih baik dan bebas dari prostitusi. Prestasi yang diraih memberikan pandangan dari daerah lain kepada pemerintahann Kota Semarang dan bisa menjadi percontohan untuk daerah lain. Pemerintahan Kota Semarang semakin terhormat dikalangan perpolitikan di Indonesia. Namun dalam segala dampak yang paling penting bagi masyarakat sendiri adalah perekonomian mereka yang berubah terutama WPS dan warga yang bekerja di daerah lokalisasi. Hal ini dikarenakan ekonomi sendiri adalah alasan utama para WPS bekerja di bidang tersebut. Pendapatan mudah, cepat, dan besar menjadikan alasan utama mereka terjun ke dalam dunia malam dan beradaptasi untuk menjalani mata pencaharian mereka. Pemberian ganti rugi hanya sekedar ganti rugi pemerintah terhadap mereka yang merasa dirugikan dan bukanlah sebuah metode pemerintah dalam mengatasi peralihan ekonomi WPS dan pekerja di Lokalisasi Sunan Kuning. Dana tali asih sendiri juga hanya terlihat sebagai salah satu bagian dari isi kebijakan penutupan, maksudnya adalah bahwa setiap adanya kebijakan penutupan lokalisasi pasti ada dan ganti rugi bagi WPS layaknya penutupan lain seperti di Surabaya maupun daerah lainnya yang sudah melakukan penutupan tempat lokalisasi sebelum Kota Semarang. Maka dari itu, di kemudian hari setiap daerah yang ingin melakukan penutupan pasti memberikan dana ganti rugi dan terus menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab mereka. Fenomena itu bukanlah sebuah hal negatif karena apabila tidak

adanya dana tersebut memungkinkan adanya perlawanan dari warga yang dirugikan bahkan dapat menciptakan konflik berkepanjangan yang mengancam kedua pihak yaitu warga dan pemerintah. Perekonomian yang dijalani oleh mantan WPS berubah namun tidak dapat dipantau oleh pemerintah. Pada dasarnya, cukup banyak warga daerah lain yang merantau dan bekerja di tempat tersebut. Maka dari itu pemerintah sendiri cenderung lepas tangan untuk menjamin masa depan perekonomian mereka karena adanya bentuk pemerintahan desentralisasi di Indonesia. Namun hal tersebut tidak berbeda jauh dari warga Semarang yang menjadi WPS di sana. Bentuk pelatihan setelah penutupan pun tetap dijalankan namun tidak adanya jaminan keamanan perekonomian para WPS yang sudah tidak bekerja di sana.

4.2. Saran

Segala permasalahan tentu dapat dicari solusi yang tepat dan akurat serta efektif untuk mengatasinya. Pemerintah daerah Kota Semarang sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat kebijakan yang dianggap penting untuk daerah mereka. Dalam kasus penutupan ini, pemerintah juga sudah melakukan mediasi yang dianggap penting demi berjalannya kebijakan mereka. Walaupun begitu, tidak adanya jaminan bagi WPS. Kasus ini menjelaskan jika yang dipentingkan pemerintah saat ini menyelesaikan kebijakan mereka yang sudah lama dibuat agar tidak terlalu lama terbengkalai dan memakan waktu serta terus menghabiskan anggaran yang ada untuk membiayai segala kebutuhan keberlangsungan program tersebut. Kebijakan ini tetap dianggap berhasil karena tujuan utama dari kebijakan ini adalah menutup lokalisasi, bukan meniadakan

keberadaan WPS. Benar apabila penutupan telah meniadakan WPS yang bekerja di sana namun bukan berarti keberadaan mantan WPS hilang sepenuhnya hanya karena penutupan lokalisasi. Hal itu hanya bentuk dari akibat penutupan dan bukanlah jaminan jika Semarang bersih dari keberadaan WPS.

Saat ini pemerintah hanya sekedar menyediakan sebuah medium bagi mereka yang menginginkan untuk berubah dalam cara hidup mereka. Sifat kebebasan pemerintah tanpa harus memaksa mereka untuk berubah sesuai keinginan pemerintah adalah bentuk demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Segala fenomena yang terjadi tentu sudah diperhitungkan namun yang ditakutkan saat ini adalah mencegah kembali fenomena prostitusi akibat penutupan. Penyebaran prostitusi dianggap menjadi semakin samar dan tidak terpantau seperti saat adanya lokalisasi yang mudah diawasi oleh pemerintah daerah. Perlu adanya metode dan tata cara yang membentuk sebuah kebijakan mencegah kembalinya prostitusi yang menyebar akibat penutupan dan program yang melindungi moral masyarakat namun bersifat tidak memaksa. Salah satu contoh yang dapat diambil pemerintah seperti mendata mantan WPS yang sudah tidak menjalani kehidupan mereka sebagai prostitusi dan tetap memperhatikan perkembangan mereka selama beberapa tahun kedepan. Tentu hal ini sedikit mengganggu kebebasan mereka dalam kehidupan, namun hal tersebut diperlukan bagi keamanan moral masyarakat. Pemerintah Kota Semarang juga bisa menerbitkan peraturan mengenai prostitusi daring untuk mencegah penyebaran salah satu patologi sosial di Kota Semarang

Pada dasarnya, menjadi WPS adalah pilihan mereka sendiri namun dengan segala macam alasan yang berbeda setiap individunya, maka dari itu mereka juga

harus menerima konsekuensi akibat status mereka di masa lalu. Apabila WPS berasal dari daerah lain, perlu adanya integrasi dan kerja sama pemerintah di setiap daerah yang berbeda dan terintegrasi satu dengan lainnya. Perlu adanya hubungan kerjasama yang formal dan kuat antar daerah seperti pemberian data pengawasan dan saling mengetahui satu sama lain sehingga terjadinya hubungan baik setiap daerah. Dampak positif penutupan juga bukanlah sebuah jaminan melainkan harapan yang dicapai jika kebijakan telah selesai dijalankan.

Pemerintah sendiri dapat mempengaruhi penentuan kehidupan masyarakat dan mereka tetap bertanggung jawab dalam kesejahteraan warga. Itulah mengapa pemerintah sendiri dipilih oleh rakyat dan mereka memiliki kewajiban untuk terus menjaga daerah dan masyarakat asli mereka agar tetap terciptanya kesejahteraan di bidang sosial, moral, ekonomi, dan bidang penting lainnya.